

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM STATUS PENGUASAAN TANAH
BALETE DI DAERAH PESISIR DANAU LAPOMPAKKA
KABUPATEN WAJO**



Oleh

MULYADI

B11108455

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM STATUS PENGUASAAN TANAH *BALETE*
DI DAERAH PESISIR DANAU LAPOMPAKKA KABUPATEN WAJO

Oleh

MULYADI

B111 08 455

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Dalam Program Studi Ilmu Hukum

BAGIAN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM STATUS PENGUASAAN TANAH BALETE DI DAERAH PESISIR DANAU LAPOMPAKKA KABUPATEN WAJO

Disusun dan diajukan oleh

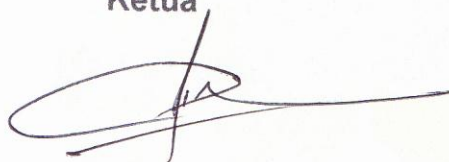
MULYADI

B 111 08 455

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 24 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

NIP. 19671231 199103 2 002

Sekretaris



Kahar Lahae, S.H., M.H

NIP. 19661231 199002 1 001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Mulyadi

Nomor Induk : B11108455

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Status Kepemilikan Tanah *Balete* di

Daerah Pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

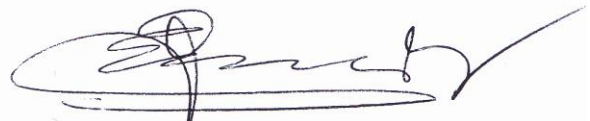
Makassar, Februari 2013

Pembimbing I



Prof. DR. Farida Patittingi, S.H, M.H
NIP.19671231 199103 2 003

Pembimbing II



Kahar Lahae, S.H, M.H
NIP. 19661231 199002 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

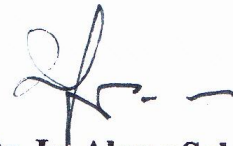
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MULYADI**
No. Pokok : B111 08 455
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Status Penguasaan Tanah *Balete*
Di Daerah Pesisir Danau Lapompakka Kabupaten
Wajo

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, Februari 2013

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



 Prof . Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaratu”

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang merupakan salah satu inspirasi bagi penulis dalam menjalankan seluruh proses kehidupan.

Terkhusus sembah sujud dan hormat penulis haturkan kepada Ibunda **Indo Ake** dan Ayahanda **Ambo Lolo** yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada saudara-saudaraku tercinta serta seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas segala doa, perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini juga, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. DR. Dr. Idrus A. Paturusi SpBO**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H.,DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** Selaku wakil Dekan Bidang Akademik. **Dr. Anshory Ilyas , S.H., M.H. ,** selaku wakil Dekan Bidang Perlengkapan dan Keuangan. **Romi Librayanto, S.H., M.H. ,**selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

4. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum**, serta **Kahar Lahae, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk bagi penulis sehingga tulisan ini dapat di rampungkan.
5. Bapak **Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.Hum.**, Ibu **Prof. Dr. Suryaman M. Pide, S.H., M.H.**, dan Ibu **Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**, selaku tim penguji yang telah meluangkan waktunya dan memberikan nasehat kepada penulis, guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak **Prof. S. M. Noor, S.H., M.H.**, selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya.
7. Para Dosen/pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi hingga selesai skripsi ini.
9. Pihak **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo, Kepala Desa Mannagae, Kepala Desa Wele**, terkhusus kepada bapak Abdul Azis, dan bapak Syarifuddin selaku tokoh masyarakat serta bapak Andi Herman selaku Sekertaris Desa Mannagae yang banyak membantu dalam proses penelitian penulis.
10. Saudara-saudaraku di Asrama Belawa : Firdaus, Muh. Hamdi, Miswar, Muh. Edil, A. Muh. Masrur, Sulaiman Mustafa, Muh. Sukri, Muh. Aljazair Rauf, Muh. Almudabbir Rauf, Abdul Munir, Atman Syahrir, A. Amri Adam, A. Syahrul Ayali, A. Arif Budiman, dan Ahmad Fuadi yang telah banyak

memberikan dukungan, motivasi, serta telah menghiasi hari-hari Penulis di Asrama Belawa dengan Canda tawa dan kenangan yang tidak akan terlupakan sampai kapan pun.

11. Saudara-saundaraku di Keluarga Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (**HIPERMAWA**) Kom. Belawa atas segala dukungan dan motivasinya selama ini.
12. Rekan-rekanku di Fakultas Hukum, Hasrul SH, Rimba Kurniawan SH, A. Basuki Rahmat SH, Batara Rantetampang, A. Muh. Irsan, Ryan Anshari atas segala kenangan yang dilalui bersama selama berada di fakultas hukum.
13. Saudara-saudaraku KKN GEL. 81 di Kecamatan Labbakkang terkhusus di posko Desa Kanaungan, Ammar Hakim, Isnaen, Musdar Tahir, Nitha Indriana, Rustivani, Nawir atas segala kenangan yang tidak terlupakan selama ini.
14. Saudara-saudaraku dari Universitas Islam Negeri Alauddin se-posko Desa Kanaungan, niswar, Jamaluddin, Iful, Rudi, Onet, Inar, Nur, Hikma, Ecce dan indar atas rasa persuadaraan selama KKN bahkan sampai saat ini.

Selayaknya seorang manusia biasa yang takkan luput dari kekurangan dan kelemahan, begitupun halnya dengan penulis yang menyadari bahwa skripsi ini belumlah pantas dianggap sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan ikhlas menerima segala saran dan kritikan yang membangun. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah.

Akhir kata, tiada kata yang patut diucapkan selain doa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap aktivitas

keseharian kita, tak terkecuali kepada semua pihak keluarga, sahabat, guru dan dosen serta rekan-rekan seperjuangan yang telah memberi arti dalam hidup penulis yang takkan pernah terlupakan.

“Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”.

Makassar, Januari 2013

Penulis

mulyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanah <i>Balete</i>	8
B. Danau.....	9
C. Nelayan.....	12
D. Tanah	14
E. Hak-Hak Atas Tanah	15
1. Hak Milik.....	18
2. Hak Pakai.....	21

3. Hak Pengelolaan	22
4. Hak Membuka dan Memungut Hasil Hutan	23
F. Proses Terjadinya Hak Atas Tanah	24
1. Menurut Hukum Adat	24
2. Penetapan Pemerintah	24
3. Ketentuan Undang-Undang	25
G. Hubungan Hukum dan Hak Atas Tanah.....	25
H. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Milik Atas Tanah	26
I. Jaminan Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah ..	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	31
B. Populasi dan Sampel	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Jenis Dan Sumber Data	32
E. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Keadaan wilayah	33
2. Keadaan penduduk.....	35
3. Identitas Responden	37
B. Bentuk Pengaturan Tanah <i>Balete</i>	
1. Proses terjadinya tanah <i>balete</i>	39
2. Lama penguasaan tanah <i>balete</i>	42

3. Bentuk pengaturan tanah <i>balete</i>	45
C. Status Penguasaan Tanah.....	46
1. Menurut Hukum Adat Setempat	48
2. Menurut UUPA.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk	36
Tabel 2. Tingkat Umur Responden	38
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden	39
Tabel 4. Luas Tanah Balete.....	44
Tabel 5. Lama Penguasaan.....	45
Tabel 6. Proses Pemindahtanganan.....	48

ABSTRAK

MULYADI (B111 08 455) “Tinjauan Hukum Status Penguasaan Tanah *Balete* Di Daerah Pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo “ (dibimbing oleh Ibu Farida Patittingi sebagai pembimbing I dan Bapak Kahar Lahae sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status penguasaan tanah *balete* yang terletak di pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo, pengaturan penguasaan tanah *balete* menurut hukum adat setempat dan pengaturan yang berdasarkan pada UUPA serta mengetahui pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin pengelolaan maupun kepemilikan.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Wajo, tepatnya di Desa Mannagae Kecamatan Tanasitolo dan Desa Wele Kecamatan Belawa, dengan menetapkan subjek penelitian meliputi: masyarakat Desa Mannagae dan Desa Wele yang menguasai tanah *balete* yang ditentukan secara *rendem*, masyarakat setempat yang dijadikan responden. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data skunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah status penguasaan tanah *balete* yang didasarkan pada hukum kebiasaan setempat yang mayoritas tidak dilengkapi dengan dengan izin pengelolaan maupun kepemilikan dari pemerintah setempat. UUPA tidak mengatur mengenai tanah *balete* tetapi karena berada di daerah pesisir dan terjadi akibat endapan lumpur maka dikategorikan sebagai tanah timbul. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang penatagunaan tanah menetapkan bahwa tanah timbul (tanah *balete*) merupakan tanah negara yang harus dimohonkan hak pengelolaan dan kepemilikan dengan memperhatikan garis sempadan danau dan rencana tata ruang wilayah. Kendala dalam penegasan status penguasaan tanah *balete* sebagai tanah negara adalah pemerintah belum melakukan tindakan untuk mendata mengenai tanah *balete* di wilayah tersebut serta keengganan masyarakat setempat untuk melaporkan tanah *balete* dikuasainya selama ini, sehingga penguasaannya tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai salah satu kebutuhan dalam penyelenggaraan hidup manusia memiliki peranan yang sangat vital. Masyarakat Indonesia yang bercorak hidup agraris menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah. Tanah sebagai objek utama yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan agraria baik yang berbentuk pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan. Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan kemapanaan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan. Dalam lingkup daerah perkotaan tanah memiliki peranan utama sebagai lahan perkantoran dan pemukiman. Oleh karena itu tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena dari semua kebutuhan manusia, tanah menjadi kebutuhan pokok yang mendasar dan menjadi tempat bagi manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan hidupnya.¹

Tanah sangat berarti sekali karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Tanah dapat di nilai sebagai harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicanangkan untuk kehidupan masa yang akan datang. Tanah dalam kehidupan manusia tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata, akan tetapi menyangkut masalah-masalah sosial, politik, budaya, dan juga terkandung aspek pertahanan dan keamanan . Berdasarkan asumsi tersebut, maka dalam suasana pembangunan yang semakin marak, kebutuhan akan tanah semakin

¹ Mariot P. Siahaan, 2005, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, Rajawali Press: Jakarta, Hlm. 1

meningkat sehingga dalam pemecahan masalahnya seharusnya memperhatikan dan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat ketersediaan lahan pemukiman semakin terbatas. Di daerah perkotaan lahan-lahan produktif yang biasanya menjadi lahan perkebunan dan pertanian di timbun untuk tempat mendirikan perumahan maupun perkantoran, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat perkotaan memasoknya dari daerah pedesaan di karenakan menipisnya lahan produktif di daerah perkotaan.

Berdasarkan populasi penduduk semakin meningkat dan kebutuhan akan tanah semakin terbatas, maka diperlukan adanya pengaturan dari Negara. Pengaturan yang dimaksud dalam hal ini meliputi pemilikan, penguasaan, serta pemeliharannya sehingga tertata secara sistimatis.²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA pada pasal 19 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada intinya secara spesifik pemerintah mengatur pemberian hak milik atas tanah melalui prosedur pendaftaran tanah yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA supaya tidak menimbulkan kepemilikan ganda ataupun meminimalisir kepemilikan yang tidak jelas yang berdampak menimbulkan sengketa tanah karena tidak adanya bukti autentik yang menjadi alas hak yang

² Soedarmanto, 2011, *Status hukum Penguasaan Tanah Timbul (Tanah Lorong) Pada tepian Sungai Walennae Kabupaten Soppeng*, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 2.

sah dan kuat. Mendaftarkan tanah menjadikan kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi teratur dan tertata dengan baik, sehingga berdampak positif juga terhadap pemerintah baik dari pemungutan Pajak Bumi Bangunan, pemberian ganti rugi terhadap pengambilan tanah untuk fungsi sosial maupun pendataan kepemilikan tanah.

Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang yang memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya tidak semata-mata hanya memberikan jaminan dan kepastian hukum. Pendaftaran tanah yang dikonversi dalam bentuk sertifikat sebagai bukti autentik kepemilikan memiliki nilai ekonomis yang besar dalam masyarakat. Sertifikat dapat dikategorikan sebagai surat-surat berharga. Sertifikat sebagai wujud pemberian hak atas tanah. Pemberian hak atas tanahnya itu, pemberian hak yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau sesuatu badan hukum.³

Dalam perkembangan globalisasi yang semakin pesat dimana teknologi sudah menjadi kebutuhan primer dalam penyelenggaraan hidup manusia. Manusia menggunakan teknologi dalam segala bidang, baik aspek sosial, politik, pertahanan dan keamanan, budaya maupun penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkhusus pada penyelenggaraan, pendataan dan pendaftaran tanah yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional/(BPN) sudah menjadi prioritas utama demi menunjang keefektifan dan akuratnya penerbitan sertifikat tanah.

³ Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 1

Besarnya perhatian dan banyaknya program yang diterapkan pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional/(BPN) demi menunjang pendaftaran tanah secara maksimal, tetapi dalam kenyataan masih banyak tanah yang belum terdata dan terdaftar dalam arsip.

Di daerah Kabupaten Wajo terdapat danau besar yang dikenal dengan nama Danau Tempe. Danau tersebut sering mengalami luapan yang sangat besar ketika musim penghujan tiba. Akibatnya terbentuklah endapan lumpur yang lama kelamaan menjadi padat di daerah pinggiran danau. Pada musim kemarau endapan lumpur yang padat ini menjadi tanah kering yang disebut masyarakat disana sebagi tanah *koti*/ tanah *telleng*/ tanah *tonrong* . Tanah endapan ini disebut tanah *koti*/tanah *telleng*/tanah *tonrong* karena lahan yang produktif untuk penanam palawija ini di kelola oleh masyarakat secara bergiliran atau diundi. Tanah *koti* diperuntukkan untuk masyarakat hanya sebatas mengelola sedangkan masalah kepemilikannya termasuk kategori tanah milik Negara, sedangkan pengaturan dan pengawasan berada di tangan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan tanah *koti*, masyarakat di kenakan pajak retribusi berdasarkan ketentuan PERDA Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang kemudian direvisi pada tahun 2012 menjadi PERDA Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Di daerah pesisir danau bukan sekedar tanah *koti* saja yang ada tetapi ada juga jenis tanah lain yang terdapat di daerah pesisir utara Danau Tempe. Tanah ini lebih dikenal sebagai tanah *balete*. Jenis tanah ini terbentang dipesisir utara Danau

Tempe atau lebih dikenal dengan sebutan Danau *Lapompakka* atau *Tappareng Lapongpakka*.

Tanah *balete* termasuk salah satu jenis tanah yang terbentang sepanjang pesisir Danau Lapompakka, tepatnya di Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Belawa. Nama *balete* sendiri berasal dari nama alat tangkap ikan yang berbentuk seperti tambak. Tanah *balete* dimiliki melalui proses pembukaan lahan hutan rawa kemudian dikelola secara berkesinambungan dan secara turun-temurun. Posisi tanah ini sendiri berada pada daerah genangan danau sehingga hanya produktif pada saat musim kemarau.

Di wilayah teritorial Kabupaten Wajo Kedua jenis tanah ini memiliki posisi dan gambaran corak tanah yang sama hanya perbedaan yang sangat mencolok dari segi kepemilikan dan proses terbentuknya. Tanah *telleng* termasuk kategori tanah negara karena timbul berdasarkan faktor alam, tetapi walaupun begitu hak pengelolaannya tetap berada di tangan masyarakat yang dilakukan secara bergilir. Pemerintah hanya berfungsi mengawasi serta memungut retribusi terhadap tanah *telleng* tersebut. Sedangkan tanah *balete* termasuk kategori milik individu karena timbul berdasarkan pembukaan hutan rawa yang dilakukan oleh masyarakat.

Semakin berjalannya waktu nilai ekonomis tanah *balete* semakin besar dan potensi lahan pertanian semakin menjanjikan sehingga kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Hal ini dapat menimbulkan masalah tersendiri bagi pemegang hak milik. Proses timbulnya hak milik atas tanah *balete* ini sendiri berawal dari pembukaan lahan hutan rawa yang dilakukan oleh masyarakat. Pada masa awal kemerdekaan, pihak pemerintah memberikan wewenang kepada

masyarakatnya untuk membuka lahan untuk dikuasai, dimiliki, dan dikelola demi memenuhi kebutuhannya hidupnya. Kemudian tanah tersebut diwariskan secara turun temurun, selain itu juga, sudah ada yang mengalami proses perpindahan tangan melalui jual-beli. Tetapi masalahnya tanah *balete* ini sendiri sampai sekarang tidak memiliki bukti kepemilikan secara tertulis terkait kepemilikan tanah walaupun secara lisan pemerintah desa setempat mengakui hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menganggap perlu melakukan penelitian mengenai “status kepemilikan tanah *balete*”, sebab banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dan memperjuangkan kerja kerasnya dalam membuka lahan hutan rawa tersebut menjadi tanah *balete* serta menjadikan tanah tersebut sebagai tanah yang dimilikinya secara administratif maupun secara lisan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan tanah *balete* di daerah pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana status Penguasaan Tanah *Balete* di daerah pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan tanah *balete* di daerah pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui bagaimana status Penguasaan Tanah *Balete* di daerah pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai pertanahan dan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Wajo.
2. Menjadi bahan acuan dan masukan bagi para pihak yang terkait dalam status penguasaan tanah *balete*, khususnya di Kabupaten Wajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah *Balete*

Tanah *balete* (tambak pasang surut) adalah tanah daerah genangan air Danau Lapompakka. Difungsikan sebagai alat tangkap pasif ketika datang musim penghujan dan dijadikan lahan penanam palawija pada musim kemarau. Sedangkan lahan tanah *balete* yang sudah dicetak menjadi persawahan akan ditanami padi.⁴

Pemilik Tanah *balete* mengungkapkan bahwa tanah *balete* merupakan bagian dari jenis alat tangkap pasif dan biasa juga disebut dengan tambak pasang surut, hal itu dikarenakan tanah tersebut berbentuk seperti tambak pada umumnya tetapi sistemnya berbentuk penangkapan. Pada ketinggian air tertentu setiap orang bisa melakukan penangkapan ikan tetapi apabila pematang *balete* sudah muncul maka menjadi hak individu pemilik untuk menangkap ikan di areal alat tangkap miliknya.

Pemilik tanah *balete* juga mengungkapkan bahwa Sistem kerja alat tangkap *balete* ini sendiri berawal apabila air danau mengalami luapan, mengakibatkan tanah *balete* ini terkenang air. Pada saat air meluap, ikan juga mengikuti air masuk di dalam lingkaran alat tangkap *balete*. Selama air belum surut ikan tinggal dan berkembang biak disana. Ketika cuaca sudah mengalami pergantian musim yaitu dari musim hujan ke musim kemarau maka air secara otomatis akan surut

⁴ Lurah Tangkoli Nilai Tak Ada Perampasan Hak Sengketa Perbatasan Maniangpajo-Tanasitolo Diakses di beta.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid. Tanggal 28 September 2012 Pukul 11.15 WITA.

sehingga pembatas alat tangkap *balete* muncul dan pada saat itu air dan ikan tertahan di dalam lingkaran pembatas. Untuk menangkap ikan dalam lingkaran maka, dibuatlah jalur pembuangan air yang dipagari *salima* (bambu yang dikecilkan baru di runyam berbentuk tikar). Fungsi *salima* ini sendiri sebagai pembatas supaya ikannya tidak ikut keluar bersama air. Setiap Alat tangkap *balete* dapat menghasilkan 30- 100 *belle* setiap musim penangkapan. 1 *belle* kurang lebih beratnya 25 kg. Apabila lahan *balete*-nya digarap dan ditanami padi maka, dapat menghasilkan sekitar 50- 70 karung gabah perhektarnya.

B. Danau

Danau adalah sejumlah air (tawar atau asin) yang terakumulasi di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya gletser, air sungai, atau karena adanya mata air. Danau merupakan cekungan besar diuka bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan⁵.

Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air. Danau dapat memiliki manfaat dan fungsi seperti irigasi pengairan sawah, ternak serta kebun, sebagai objek wisata, sebagai pembangkit listrik tenaga air/(PLTA), sebagai tempat usaha perikanan darat, sebagai sumber penyediaan airbag makhluk hidup sekitar dan sebagai pengendali banjir dan erosi.⁶

⁵ “ Pengertian Danau” diakses di www.pengertiandefinisi.com › *Danau*. tanggal 22 oktober 2012 Pukul 21.45 WITA.

⁶“ Defenisi/Pengertian Danau, macam/jenis & fungsi danau di Indonesia-Belajar Geografi” diakses di organisasi.org › *Ilmu Pengetahuan Alam* › *Geografi*. Tanggal 22 Oktober 2012 Pukul 22.10 WITA.

Danau adalah sebuah tempat yang mengandung air asin maupun air tawar yang dikelilingi oleh daratan. Dari segi ukuran danau cukup luas, danau berasal dari sebuah mata air, aliran sungai, atau mencairnya gletser. Danau berbeda dengan laut, danau mirip seperti kolam raksasa di sebuah daratan. Danau berbeda juga dengan sungai karena sungai memiliki aliran air yang biasanya mengalir.⁷

Danau biasanya dibedakan berdasarkan bagaimana danau itu bisa terjadi. Jenis-jenis danau berdasarkan proses kejadiannya:⁸

1. Danau Vulkanik

Danau vulkanik terbentuk akibat aktivitas vulkanik (gunung berapi). Kawah atau kepundan gunung api baik yang masih aktif maupun yang sudah mati apabila terisi air akan menjadi danau. Danau yang terbentuk disebut danau crater. Contoh: Danau Kelimutu, Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, Danau Batur, dan Danau Telaga Warna di Dieng.

2. Danau Tektonik

Danau tektonik terbentuk ketika terjadi gerakan/pergeseran lempeng tektonik yang membentuk lipatan/patahan. Cekungan yang terbentuk akibat pergeseran lempeng tersebut akhirnya terisi oleh air hujan dan membentuk genangan air yang sangat luas. Contoh danau yang terbentuk dari proses ini adalah Danau Singkarak, Danau Matana di Sulawesi Selatan, Danau Poso, dan Danau Towuti.

3. Danau Tektovulkanik

⁷“ Pengertian Danau” diakses di <http://id.shvoong.com/exact-sciences/astronomy/2243381-pengertian-danau/#ixzz2A1d5svMm>. Tanggal 22 Oktober 2012 Pukul 22.15 WITA.

⁸ “ Berbagai Jenis Danau Di Dunia” diakses di arisudev.wordpress.com/.../berbagai-jenis-danau/. tanggal 22 Oktober pukul 22.40 WITA.

Danau ini terbentuk akibat penggabungan proses tektonik dan vulkanik. Pada saat terjadi erupsi gunung api (meletus), sebagian badan gunung api patah dan merosot menutupi lubang kepundan. Patahnya gunung ini disebabkan adanya kekosongan dapur magma pada saat terjadi gunung meletus. Jika daerah patahan tersebut terisi air, maka akan terbentuk danau. Contoh danau yang terbentuk karena hal ini adalah Danau Toba.

4. Danau Glasial

Danau glasial (gletser) biasanya terbentuk di daerah pegunungan. Pada saat salju mencair, akan terbentuk gletser yang meluncur ke bawah (erosi salju). Hasil erosi salju yang berupa basin (cekungan di lereng) jika terisi oleh air hujan atau salju yang mencair akan membentuk genangan yang disebut *danau gletser*. Contohnya, Danau Finger di New York dan The Great Lakes di Amerika.

5. Danau Aliran/Ladam

Sungai yang besar biasanya membentuk kelokan aliran sungai di hilir sungai tersebut, yang disebut meander. Hasil erosi oleh sungai yang terendapkan akan menutup aliran sungai pada meander sehingga meander sungai terpisah dari aliran sungai yang baru. Jika sisa aliran ini terisi lebih lanjut oleh air, maka akan terbentuk *danau oxbow* atau danau tapal kuda. Danau Oxbow sering dijumpai di beberapa sungai di Kalimantan.

6. Danau Karst

Danau ini terbentuk melalui proses pelarutan zat kapur oleh air. Pelarutan kapur tersebut menghasilkan suatu bentuk cekungan yang jika terisi air hujan akan membentuk danau karst berupa dolina. Jika ukuran suatu danau karst lebih besar

daripada dolina pada umumnya, maka disebut uvala. Danau karst yang lebih besar daripada uvala adalah polje. Contohnya adalah dolina di Biak, Papua, dan di Pegunungan Seribu (Yogyakarta).

7. Danau Laguna

Danau ini terjadi akibat kombinasi antara angin dan ombak yang membentuk tanggul-tanggul pasir di sepanjang pantai. Kemudian, tanggul-tanggul pasir ini membentuk suatu genangan air yang disebut *danau laguna*. Contohnya adalah danau laguna di Ternate.

8. Danau Bendungan

Danau bendungan terbentuk dari pembendungan aliran sungai. Pembendungan ini bisa terjadi karena dua sebab, yaitu karena longsor (proses alami) dan direncanakan (buatan manusia). Contoh danau bendungan oleh proses alam adalah Danau Pengilon di Dieng dan Telaga Sarangan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain oleh proses alam, danau ini bisa dibuat oleh manusia dengan kesengajaan (direncanakan) untuk membendung aliran sungai. Danau yang terbentuk biasa disebut waduk. Contoh waduk ada banyak, di antaranya Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, dan Waduk Gajah Mungkur.

C. Nelayan

Pada umumnya di Indonesia, nelayan dikategorikan orang yang mempunyai pekerjaan melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sederhana seperti pancing, jala jarring, dan bubu ditambah perahu sebagai alat bantu serta metode penangkapan ikan yang masih tradisional.

Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup didasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat berupa perairan air tawar, payau, maupun laut. Di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara Dan Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih.⁹

Menurut Johannes Widodo dan Suadi bahwa nelayan merupakan orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan.¹⁰

Selanjutnya M. Yusuf DM mengemukakan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan baik di laut, selat, teluk atau danau maupun di sungai dengan menggunakan perahu atau kapal dan dengan atau menggunakan perangkap.¹¹

Masyarakat nelayan adalah sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai atau daerah kepulauan, yang struktur ekonominya tergantung pada laut sehingga potensi laut adalah modal utama bagi kehidupan mereka. Kegiatan penangkapan ikannya menggunakan alat tangkap tradisional yang cara

⁹ “Nelayan” di akses di Id.wikipedia.org/wiki/Nelayan. Tanggal 1 Oktober 2012 Pukul 13.01 WITA.

¹⁰ Johannes Widodo dan Suadi, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta, 2008, Hlm. 29.

¹¹ M. Yusuf DM.. *Kemiskinan Nelayan Tradisional Di kecamatan Binamu Kabupaten Jenenponto*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2002 Hlm 18.

pembuatan dan pemakaiannya di dasarkan pada kearifan dan kondisi lokal. Hal ini tercermin dengan adanya norma-norma lokal yang sangat mempengaruhi cara kerja maupun penguasaan sumber-sumber perikanan.¹²

Dalam mendukung pekerjaannya, umumnya nelayan-nelayan hidup dengan membentuk kelompok-kelompok yang anggotanya biasanya diantara mereka sendiri dengan hanya melihat kesamaan daerah asal saja seperti sesame dusun, desa, ataupun suku.

D. Tanah

Kamus besar bahas Indonesia terbitan pustaka Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, mengemukakan bahwa yang dimaksud tanah adalah lapisan permukaan atau lapisan bumi yang di atas sekali.¹³

Pengertian tanah ditinjau dari segi *geologis-agronomis*, Tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas. Dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan.¹⁴

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebahagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebahagian dari ruang yang diatasnya, dengan pembatasan dalam pasal 4, yaitu: sekedar diperlukan untuk

¹² Sri Susyanti Nur, Hak guna laut dalam usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan (suatu Kajian Hukum Agraria Kelautan), Pustaka Pena Press, Makassar, 2010, Hlm. 4.

¹³ Mohammad Hatta, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Media Abadi, Yogyakarta, 2005, Hlm. 24.

¹⁴ Y.W Sunindhia, dan Ninik Widiyanti. Pembaharuan Hukum Agraria. Bina Aksara. Jakarta. 1988. Hlm 8.

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.¹⁵

E. Hak-Hak Atas Tanah

“Hak” pada hakekatnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Seseorang terhadap sesuatu (benda / prestasi), sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (hubungan subjek objek). Jadi apabila seseorang memperoleh sesuatu hak atas tanah, maka pada orang tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah yang disertai pula dengan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum, dan perolehan hak atas tanah pada prinsipnya dapat dibedakan dalam:

1. Perolehan secara *originair*, yaitu perolehan secara asli, misalnya dengan membuka tanah (okupasi);
2. Perolehan secara *derivatif*, adalah perolehan karena terjadinya peralihan hak secara yuridis, misalnya jual - beli, tukar - menukar dan lain sebagainya.¹⁶

Hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan oleh pemegak hak atas tanah tersebut. Menurut pasal 4 ayat (2) UUPA, hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula bumi, air, dan ruang angkasa yang ada di atasnya,

¹⁵ Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia. Djambatan. Jakarta: 2008. Hlm 262.

¹⁶ Hapusnya Hak Atas Tanah di akses di landdiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atas-tanah.html. tanggal 2 Oktober 2012 pukul 14.23 WITA.

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) mengemukakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan perorangan, kelompok maupun badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberikan wewenang untuk memanfaatkan dan mempergunakannya yang langsung berhubungan dengan tanah itu, dengan batasan UUPA dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi lainnya.

Sehubungan dengan hak atas tanah diatas, maka di tuangkan secara mengkhusus mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil utang dan hak lain yang tidak termasuk dalam hak diatas. Untuk lebih lengkapnya akan dijabarkan sebagai berikut.¹⁷

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:

- a. hak milik;
- b. hak guna-usaha;
- c. hak guna-bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak sewa ;
- f. hak membuka tanah ;
- g. hak memungut- hasil- hutan;
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

¹⁷ Boedi Harsono, *op. Cit.*, Hlm 10.

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 Jo 53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Contoh: HM, HGU, HGB, HP, Hak Sewa untuk Bangunan dan Hak Memungut Hasil Hutan

2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang

Hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

3. Hak atas tanah yang bersifat sementara.

Hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Contoh: Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.¹⁸

Menyangkut dengan hak –hak atas tanah maka, kita perlu mengkaitkannya dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna “dikuasai” oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus “dimiliki” secara keseluruhan oleh Negara, tetapi pengertian “dikuasai” itu membawa wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk tingkatan tertinggi.¹⁹

¹⁸ Hak –hak atas tanah menurut UUPA dan PP. No. 40/1996 di akses di hasyimsoeka.blogspot.com/.../hak-hak-atas-tanah-menurut-uupa-dan-pp/40/1996

¹⁴ G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan Indonesia, PT Bineka Cipta. Jakarta. 1992. Hlm 2.

- a. mengatur dan menyelenggarakan tanah untuk penggunaan, persediaan, dan pemeliharannya;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air, dan ruang angkasa di atas tanah itu;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum antara orang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa di atas tanah itu.

Segala sesuatu yang disebutkan di atas itu dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur, walaupun demikian tidak secara keseluruhan dari tanah tersebut melekat apabila sudah memiliki hak atas permukaan tanah. Dalam UUPA hak atas tanah tidak meliputi pemilikan kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi di bawahnya.

Boedi Harsono mengemukakan bahwa berdasarkan penjelasan dalam pasal 8 UUPA disebutkan karena hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.²⁰

1. Hak Milik

Dalam berbagai literatur di definisikan berbagai bentuk dan sudut pandang mengenai hak milik atas tanah. Hak milik sebagai salah satu hak yang

²⁰ Ibid. Hlm. 19.

melekat dalam benda menjadikannya selalu jadi kajian yang serius dalam penentuan dan pembentukan pokok-pokok hak suatu benda.

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial pasal 20 UUPA. Sifat kuat dan terpenuhi berarti yang paling kuat dan paling penuh, berarti pula bahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah itu mempunyai hak untuk berbuat bebas, artinya boleh mengasingkan tanah miliknya kepada pihak lain dengan jalan menjualnya, menghibahkan, menukarkan dan mewariskannya.

“Turun temurun” artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya sudah meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. “Terkuat”, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah dihapus. “Terpenuhi”, artinya hak milik atas tanah member wewenang kepada pemiliknya paling luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan untuk berniat bebas terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum

yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.²¹

Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.

Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Ini berarti selain warga Negara Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.

terdiri dari:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Negara Bank);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 139);
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria

²¹ soedharyo Soimin, 2004, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 1.

Setelah Mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.²²

2. Hak Pakai

Hak pakai menurut pasal 41 UUPA hak yang diberikan Negara untuk digunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanahnya, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan asas dan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria.

Dalam hal misalnya bagi kedutaan-kedutaan dapat diberikan hak pakai, jadi pemakaian tanahnya bukan dalam rangka perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah dan lain sebagainya, hak pakai ini dapat berlaku sepanjang tanahnya dipergunakan untuk itu. Pemberian hak pakai dapat dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa yang berupa apapun. Akan tetapi, tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. Yang dapat mempunyai hak pakai menurut pasal 39 PP. Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah;
- d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
- e. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. "Hak-hak Atas Tanah". Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. Hlm

- f. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.

Tentang pengalihan hak pakai, menurut pasal 54 PP. Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah sepanjang mengenai tanah yang langsung dikuasai pengalihannya kepada pihak lain haruslah seizin pejabat yang berwenang, sedang hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, apabila memungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan dengan pemilik tanahnya.

3. Hak Pengelolaan

Di dalam praktek dikenal pula adanya hak pengelolaan yang bersumber pada UUPA, dimana perumusan mengenai hak pengelolaan tersebut dituangkan dalam PP. Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pasal 1 ayat (3) sebagai berikut:

“hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya”

Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk:

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai PMDN No. 6 Tahun

1972 jo. No. 5 Tahun 1973 dan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

- d. Menerima uang pemasukan dan/atau uang wajib tahunan”.

Seperti dengan hak-hak atas tanah yang lain dimana hak-hak tersebut dapat habis karena sesuatu hal, maka hak pengelolaan juga habis karena:

- a. Dilepaskan oleh pemegang haknya;
- b. Dibatalkan karena tanahnya tidak dipergunakan sesuai pemberian haknya;
- c. Dicabut oleh Negara untuk kepentingan umum;
- d. Karena berakhir jangka waktunya.

Disamping penguasaan tanah negara dengan hak pengelolaan, dapat juga merupakan dasar untuk menyelenggarakan perusahaan tanah oleh daerah-daerah dan instansi-instansi lain. Pada umumnya tanah-tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan itu merupakan tanah-tanah bangunan yang sudah dimatangkan sendiri oleh penerima hak.

4. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan bahwa:

- (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.²³

lebih lanjut hak membuka tanah dan memungut hasil hutan di atur dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976, tanggal 13 Januari 1976 Tentang Pedoman Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan, Dengan Bidang

²³ Boedi Harsono. 2004. *op. cit.* Hlm. 19.

Tugas Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum, mengenai pelaksanaan pemberian hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan

F. Proses Terjadinya Hak Atas Tanah

Hak milik terjadi melalui tiga (3) cara yaitu:

1. Menurut hukum adat

Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan). Artinya, pembukaan tanah (hutan) tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui sistem penggarapan, yaitu matok sirah, matok sirah gilir galeng, dan sistem bluburan atau terjadi karena timbulnya “lidah tanah” (aanslibbing). Lidah tanah adalah tanah yang timbul/muncul karena terbloknya arus sungai atau tanah di pinggir pantai, biasanya terjadi dari lumpur yang makin lama makin tinggi dan mengeras. Dalam hukum adat, lidah tanah yang tidak begitu luas menjadi hak bagi pemilik tanah yang berbatas. Hak milik tersebut dapat didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan sertifikat hak miliknya.

2. Penetapan pemerintah

Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah (semula berasal dari tanah negara) oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah semua terpenuhi, BPN menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH tersebut wajib didaftarkan oleh pemohon kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sebagai sertifikat hak milik atas tanah.

3. Ketentuan Undang-Undang

Terjadinya hak milik atas tanah ini didasarkan konversi (perubahan) menurut UUPA. Sejak berlakunya UUPA, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.²⁴

G. Hubungan Hukum dan Hak Atas Tanah

Berbicara tentang hukum pada umumnya dimaksudkan adalah seluruh aturan tingkah laku beberapa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang ditaati oleh setiap masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut. Dapatlah dikatakan bahwa merupakan kehendak dan ciptaan manusia berupa norma –norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak oleh dilakukan. Oleh karena itu, harus mempunyai sanksi dan mengandung nilai keadilan, kegunaan, serta nilai kepastian dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.²⁵

Sebaliknya sering juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan hukum antara individu dan masyarakat yang dititiberatkan pada kepentingan pribadi.²⁶

Barang siapa berani atau tidak mengindahkan hubungan hukum itu maka terpaksa untuk menghormatinya akan dihukum oleh hukum. Hubungan hukum antara individu dan seorang individu lainnya dalam hal melakukan jual beli,

²⁴ “Proses terjadinya hak milik” diakses di fourseasonnews.blogspot.com/.../proses-terjadinya. Tanggal 22 Oktober 2012 Pukul 22.00 WITA.

²⁵ Chairur Arrasyid, *Dasar-Dasar Dalam Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. Hlm. 23.

²⁶ Chairur Arrasyid. *Op. cit.* Hlm. 38.

misalnya si A menjual dua unit Motor kepada si B. Perjanjian menimbulkan hubungan hubungan antara A dengan B dan hubungan itu diatur oleh hukum (pasal 1457 KUH Perdata). A wajib menyerahkan dua unit motor kepada si B, sebaliknya juga si B wajib membayar harga kedua motor itu, dan berhak pula meminta kedua motor tersebut dari si A. apabila salah satu pihak, atau keduanya telah melalaikan kewajibannya maka oleh hakim dapat dijatuhi sanksi hukum. Hubungan antara A dan B yang diatur oleh hukum itu disebut hubungan hukum (rechtsbetrekking).²⁷

H. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Milik Atas Tanah

Keberadaan hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²⁸

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut

²⁷ R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradaya Pramita, Jakarta, 1987, Hlm. 16.

²⁸ Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 27.

sebagai hak. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu diberikan hukum kepada seseorang.

Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.²⁹ Apabila saya memiliki sebidang tanah, maka saya dalam arti bahwa kepentingan saya atas tanah tersebut mendapatkan perlindungan. Namun perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap kehendak saya mengenai tanah itu. Saya bisa memberikan atau mewariskan tanah itu kepada orang lain dan hak itupun termasuk ke dalam hak saya. Dalam hal ini bukan hanya kepentingan saya yang mendapatkan perlindungan melainkan juga kehendak saya.

Selain kepentingan-kepentingan, hak-hak atas tanah juga berisikan kewajiban-kewajiban untuk menggunakan dan memelihara potensi tanah yang bersangkutan. Jaminan Kepastian hukum pemilikan hak atas tanah dalam pendaftaran tanah. Dalam UUPA kewajiban-kewajiban tersebut yang bersifat umum, artinya berlaku terhadap setiap hak atas tanah, diatur dalam:

1. Pasal 6, yang menyatakan, bahwa: semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ;
2. Pasal 15, dihubungkan dengan pasal 52 ayat (1) tentang kewajiban memelihara tanah yang diiliki;

²⁹ Rahardjo. *Op cit.* Hlm. 33.

Selain apa yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut secara umum juga kewajiban-kewajiban secara khusus dicantumkan dalam surat keputusan pemberian haknya atau dalam surat perjanjiannya serta dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan-peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersangkutan. Misalnya, pemberian hak atas tanah kepada perusahaan pembangunan perumahan (“Real Estat”), disertai kewajiban untuk menyediakan tanah bagi keperluan fasilitas sosial dan memelihara selama jangka waktu tertentu prasarana lingkungan dan utilitas umum yang diperlukan masyarakat.

I. Jaminan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah

Dalam hukum perdata dikenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*) dan dapat diperalihkan.

Dalam memperoleh jaminan hukum atas tanah, maka harus memperhatikan riwayat tentang peralihan hak atas tanah tersebut, baik berupa jual-beli, hibah atau sengketa yang mungkin pernah ada. Dengan berpatokan pada girik dan letter C yang umumnya dicantumkan pada surat jual-beli. Pengecekan dapat dilakukan melalui buku tanah desa atau langsung juga ke badan pertanahan setempat. Hal ini perlu dan penting dilakukan karena pada umumnya terkadang ada ketidakcocokan riwayat kelurahn dan BPN. Untuk biaya sertifikat tanah, tariff resmi BPN adalah sebesar Rp. 25.000,-/ sertifikat dengan waktu pengurusan paling lama 5 (lima)

hari. Biaya tersebut diluar PPAT, pajak perolehan hak atas jual-beli tanah seperti BPHTB (bea perolehan hak atas tanah/ bangunan) dan pajak penghasilan.

Untuk membuat sertifikat tanah, harus memenuhi persyaratan dokumen-dokumen seperti:

1. Permohonan
2. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan
3. Akta jual-beli dari PPAT
4. Fotocopy identitas dari pemegang hak, penerima hak dan atas kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.
5. Ijin pemindahan hak, dalam hal di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan dari instansi yang berwenang.

Jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas tanah, maka pemerintah memberikan surat tanda bukti hak atas sebidang tanah. Surat tanda bukti hak ini dinamakan sertifikat dan berlaku sebagai alat bukti yang kuat, artinya bahwa keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim, sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya.³⁰

Untuk diketahui bahwa, sesuai pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bertujuan:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak

³⁰ Ali Ahmad Chamzah, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2003, Hlm. 23.

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi.

Menurut Barhaman³¹ bahwa dengan mendaftarkan tanah maka akan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Adanya jaminan kepastian hukum berarti pemegang hak atas tanah tersebut paling tidak bahwa baginya telah memiliki dokumen atas tanahnya. Begitu pula merupakan jaminan perlindungan hukum bilamana suatu saat harus berhadapan dengan pihak lain melalui pengadilan.

³¹Barhaman, *Hak Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tesis, Universitas Hasanuddin. Makassar. 2007, Hlm. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo. Dasar pertimbangan sehingga memilih daerah pesisir Danau Lapompakka atau yang lebih dikenal dengan *tappareng lapompakka* sebagai lokasi penelitian karena pada lokasi tersebut terdapat masyarakat *pabbalete* yang mengelola tanah *balete* dan menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah hukum yang ada di lokasi penelitian berkenaan dengan *tanah balete*.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan yang menjadi target kajian penelitian, yaitu masyarakat *pabbalete* yang terdapat di bagian pesisir Danau lapompakka, yang tersebar di tiga (3) kecamatan yaitu Kecamatan Tanasitolo Kecamatan Belawa dan Kecamatan Maniangpajo.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau *random* terhadap pemilik tanah *balete* . Melihat populasi sampel yang berjumlah 50 orang dan tersebar di tiga (3) kecamatan tersebut maka, penulis membatasi dengan mengambil Desa Wele dan Desa Mannagae sebagai tempat responden karena mayoritas pemilik *balete* berdomisili di kedua desa tersebut dan dianggap dapat mewakili keseluruhan sampel penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 20 pemilik tanah *balete*. Sedangkan sebagai narasumber yaitu Dinas Kelautan Dan

Perikanan Kabupaten Wajo, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, Kepala Desa Mannagae dan Kepala Desa Wele.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara langsung dari responden di lapangan melalui wawancara dan pemberian angket/kuisisioner (daftar pertanyaan) kepada pihak responden yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Selain itu dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan melalui pengkajian informasi tertulis yang berasal dari sumber yang relevan dengan materi penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas 2 macam yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan melalui kegiatan wawancara dengan responden yang terdiri dari masyarakat yang memiliki, menguasai, menggunakan serta mengolah tanah *balete* .
2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai bahan pustaka yang relevan dan instansi terkait dengan objek yang diteliti antara lain Kantor Badan Pertanahan, Kantor Bupati, Kantor Kecamatan maupun Kantor Desa.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Keadaan Wilayah

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten Sulawesi Selatan dan secara geografis terletak pada koordinat 3°39' sampai 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' sampai 120°27' Bujur Timur. Batas Wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap (Sidenreng-Rappang).

Kabupaten Wajo berada sekitar 242 km dari Kota Makassar (Ibukota Sulawesi Selatan) dengan jarak tempuh sekitar 4 jam menggunakan mobil. Luas wilayah 2. 506, 19 km (4,01% dari luas wilayah Sulawesi Selatan). Berada pada ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut, dihuni sekitar 400. 000 jiwa dan secara administratif, wilayah tersebut terdiri dari 14 kecamatan antara lain:

1. Kecamatan Sabbangparu
2. Kecamatan Tempe
3. Kecamatan Pammana
4. Kecamatan Bola
5. Kecamatan Takkallala
6. Kecamatan Sajoanging
7. Kecamatan Majauleng
8. Kecamatan Tanasitolo
9. Kecamatan Belawa
10. Kecamatan Maniangpajo
11. Kecamatan Keera
12. Kecamatan Pitumpanua
13. Kecamatan Penrang
14. Kecamatan Gilireng

Di Kabupaten wajo selain terdapat Danau Tempe yang terkenal dengan potensi sumber daya alam dan pariwisatanya, terdapat juga Danau Lapompakka yang terbentang di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Maniangpajo, dan Kecamatan Belawa. Hampir 80 % daerah danau termasuk dalam daerah teritorial Kecamatan Tanasitolo selebihnya 15 % masuk di teritorial Kecamatan Belawa dan selebihnya lagi 5 % masuk dalam daerah Kecamatan Maniangpajo. Di bagian pesisir Danau Lapompakka terbentang jenis alat tangkap ikan pasif yang dinamakan masyarakat setempat sebagai alat tangkap *balete* (alat

tangkap pasang surut). Beberapa jenis ikan yang ditangkap umumnya jenis ikan air tawar seperti ikan mujair, ikan gabus, ikan lele dan ikan mas.

Di pesisir danau tersebar sekitar 50 unit alat tangkap *balete* yang memiliki luas minimal 1 hektar dan maksimalnya dapat mencapai 10 hektar. Atas dasar pembuatan alat tangkap *balete* yang dilakukan masyarakat ini mengakibatkan terjadinya tanah timbul disebut tanah *balete*. Tanah ini sendiri berasal dari lahan hutan rawa yang dibuka oleh masyarakat untuk kepentingan alat tangkap *balete* kemudian akibat proses alam yakni lumpur yang mengendap dan menjadi padat sehingga menimbulkan pendangkalan di pinggiran Danau Lapompakka.

2. Keadaan penduduk

Berdasarkan data statistik Kabupaten Wajo tahun 2011, tercatat bahwa daerah ini telah didiami oleh 388. 985 jiwa dengan rincian 185. 450 laki-laki dan 203. 535 perempuan, seluruhnya tersebar di 14 kecamatan dengan kecamatan terpadat penduduknya yakni Kecamatan Tempe dengan jumlah penduduk 25.754 jiwa dan jumlah rumah tangga 6. 554. Sedangkan kecamatan paling sedikit penduduknya yakni Kecamatan Gilireng dengan jumlah penduduk 11. 028 jiwa dan jumlah rumah tangga sebanyak 2.875. mata pencaharian penduduk Kabupaten Wajo didominasi oleh sektor pertanian oleh karena itu tanah sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Masyarakat yang bermukim di daerah pesisir Danau Lapompakka memiliki adat yang kuat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan tanah daerah pesisir danau. Hal ini tercermin dari kegiatan yang dilakukan masyarakat berupa *maccera tappareng* sebagai wujud

rasa syukur atas karunia berupa hasil ikan yang melimpah. Aktivitas budaya tersebut sudah dilakukan secara turun temurun. . Selain itu, mata pencaharian masyarakat setempat juga menjadi faktor pendukung mengolah tanah *balete* sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel.1
Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Desa Mannagae	Desa Wele
1	Petani	670 orang	1.588 orang
2	Pedagang	3 orang	57 orang
3	Pegawai	15 orang	69 orang
4	Tukang	10 orang	10 orang
5	Nelayan	25 orang	42 orang
6	Lain-lain	231 orang	500 orang

Sumber : Data Sekunder 2012

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa kebanyakan mata pencaharian penduduk di kedua desa adalah petani. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab sehingga tanah *balete* dapat di jadikan lahan garapan tambahan untuk lahan pertanian bagi masyarakat setempat. Selain sebagai lahan pertanian, masyarakat lebih dominan menggunakan tanah *balete* ini sendiri sebagai alat tangkap ikan pasif , hanya bagian pesisir yang terdekat dengan lahan persawahan saja yang biasa dicetak menjadi lahan persawahan karena sudah jarang tergenang dengan air danau. pengelolaan alat tangkap ikan fasif ini sebenarnya yang menjadi faktor penyebab utama terhadap timbulnya lahan tanah *balete*. Hal itu dikarenakan akibat pembuatan alat tangkap ikan pasif ini

masyarakat membuka lahan hutan di pinggiran Danau Lapompakka, setelah lahan sudah bersih maka dibuatkan pematang yang mengelilingi lahan kosong tersebut. Tinggi pematang sekitar 50 cm. Selanjutnya, akibat lumpur yang mengendap ke daerah linkaran pematang, tanah yang berada dalam lingkaran pematang mengalami pengdangkalan akibat lumpur yang memadat dan keras menyatu dengan tanah. Tanah inilah yang di sebut tanah *balete*.

3. Identitas Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menguasai tanah *balete*. Berhubung jumlah sampel yang banyak, maka penulis mengambil 10 orang dari masing-masing desa tempat penelitian sebagai responden.

Berdasarkan data yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung di lapangan dapat diketahui identitas responden meliputi umur dan tingkat pendidikan. Adapun identitas responden adalah sebagai berikut:

Tabel.2
Tingkat Umur Responden

No	Tingkat Umur	Desa Mannagae	Desa Wele	Persentase
----	--------------	---------------	-----------	------------

1	< 19	-	-	-
2	20-29	-	-	-
3	30-39	-	2	10%
4	40-49	2	-	10%
5	50-59	1	3	20%
6	>60	7	5	60%
	Jumlah	10	10	100%

Sumber : Data primer 2012

Berdasarkan pada data yang diolah pada tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat umur responden yang berada di kedua desa tersebut mayoritas >60 tahun yakni sebanyak 12 orang dari 20 responden atau 60 % berada pada rentang umur tersebut . Kondisi ini menggambarkan bahwa orang-orang yang menguasai dan mengelolah tanah *balete* sekaligus alat tangkap *balete* pada umumnya sudah berada pada tingkat usia tua yakni > 60 sehingga sudah tidak produktif dalam mengelola tanah *balete* tersebut. Hal ini yang menjadi dasar banyak yang mengalihkan penguasaan kepada anaknya maupun kerabatnya untuk di kelola dengan dasar pertimbangan ada pembagian hasil.

Tabel. 3
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Desa Mannagae	Desa Wele	Persentase (%)
----	--------------------	------------------	--------------	-------------------

1	Tidak Sekolah	10	8	90%
2	SD	-	2	10%
3	SMP	-	-	-
4	SMA	-	-	-
	Jumlah	10	10	100 %

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menguasai tanah *balete* yang dijadikan responden mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah, dari 20 responden sebanyak 18 orang atau 90% dari tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menguasai tanah *balete* menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai status tanah tersebut baik itu berbentuk hak penguasaan maupun hak kepemilikan. Akibat pemahaman dan pengetahuan yang kurang, masyarakat tidak pernah berusaha memastikan tanah yang berada dalam penguasaannya sudah memenuhi kriteria hak milik menurut undang-undang atauka tidak terpenuhi.

B. Pengaturan Tanah *Balete*

1. Proses Terjadinya Tanah *Balete*

Danau Lapompakka merupakan salah satu danau yang berada di daerah teritorial Kabupaten Wajo. Selain itu, danau ini juga salah satu potensi alam penunjang masyarakat yang berada disekitarnya. Faktor tersebut selain

berpengaruh terhadap masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dalam hal ini kekayaan ikan yang melimpah tetapi juga berpengaruh terhadap masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sepanjang daerah pesisir danau sering sekali terjadi pendangkalan yang disebabkan oleh endapan. Endapan tersebut berasal dari berbagai jenis lumpur maupun sampah-sampah yang berada di permukaan danau. Akibat pengendapan tersebut menimbulkan pendangkalan yang sangat besar pada permukaan danau, sehingga alat tangkap *balete* yang dikelola masyarakat lebih cepat dipanen daripada biasanya. Hal itu dikarenakan air yang berada di dalam alat tangkap lebih cepat surut. Daerah endapan lumpur inilah yang dinamakan tanah *balete*. Tanah *balete* yang paling dekat dengan daratan dimanfaatkan sebagai lahan untuk penanaman palawija maupun padi.

Tanah *balete* merupakan tanah yang menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat setempat sebab keberadaan tanah tersebut memberikan nilai ekonomis tambahan, akibat pembuatan alat tangkap pasif ikan/alat tangkap *balete*, masyarakat sekaligus menggarap lahan yang timbul akibat faktor alam. Proses pembuatan alat tangkap *balete* kemudian mendapatkan bantuan dari alam sehingga timbullah tanah *balete*

Berdasarkan hasil penelitian, tanah *balete* terjadi disebabkan karena adanya hasil pengendapan lumpur yang kemudian menjadi padat di pesisir danau yang disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a) Faktor perbuatan manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 responden, faktor perbuatan manusia memiliki peranan yang sangat besar dalam proses pembentukan tanah *balete*, hal itu terjadi akibat kegigihan dan kerja keras masyarakat untuk membuka lahan hutan rawa yang berada di pinggiran danau yang berlatar belakang genangan air. Lahan rawa yang penuh dengan banyak jenis tanaman air seperti *mangrove*, sematbelukar dan jenis tanaman air lainnya ditebang dan dibersihkan sehingga menjadi lahan kosong yang penuh dengan genangan air. Kemudian dibuatkan pematang yang mengelilingi tanah kosong yang telah di buka sebagai bentuk pembatas lahan yang dikuasai sekaligus penghambat ikan agar tidak ikut air apabila surut. Lahan kosong yang di kelilingi oleh pematang inilah yang dinamakan alat tangkap *balete*. Apabila air surut kemudian tanah inilah yang di tanami palawija ataupun padi. Berdasarkan tekstur tanahnya, lahan tidak dapat langsung ditanami palawija karena masih terlalu dalam sehingga susah untuk kering. Lahan warga Desa Mannagae dan Desa Wele rata-rata memiliki luas minimal hektar dan maksimal 7-10 hektar perunitnya atau setiap satu alat tangkap *balete*. Pemeliharaan dan pengelolaan alat tangkap *balete* sekaligus tanah *balete* dilakukan secara berkesinambungan oleh masyarakat. Adapun pematangnya karena setiap pasang-surut air mengalami pengikisan maka masyarakat menanggulangnya dengan cara menimbunnya secara manual maupun menggunakan mobil *eskavator*. Sedangkan untuk pencetakan sawah lahan tanah *balete* yang memiliki tekstur bergelombang maka masyarakat menggunakan tenaga mobil *eskavator* juga untuk meratakannya tapi umumnya yang dicetak

menjadi sawah yaitu tanah *balete* yang sudah jarang tergenang air dan sudah tidak produktif untuk dijadikan alat tangkap pasif /alat tangkap *balete*.

b) Faktor alam

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 responden faktor ini merupakan faktor alam yang mendukung bagi proses perbuatan manusia dalam pembentukan tanah *balete*, sebab proses alam dapat mempercepat terjadinya tanah *balete* dengan adanya air yang pasang surut dan faktor iklim yang berubah-ubah menyebabkan rusaknya hutan rawa sehingga membantu masyarakat untuk membuka lahan kosong.

Penyebab munculnya tanah *balete* tidak lepas dari peranan kedua faktor diatas yang saling menunjang sehingga mengakibatkan timbulnya lahan yang memiliki manfaat yang cukup besar bagi warga yang berada dipesisir danau terutama yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Menurut Sarifuddin (warga Desa Mannagae) bahwa tanah *balete* kaya akan tanaman air yang menjadi makanan ikan dan memiliki tingkat kesuburan yang cukup tinggi sehingga warga menguasai dan memanfaatkannya selain sebagai alat tangkap *balete*, juga sebagai lahan untuk tanaman palawija maupun lahan pertanian untuk penanaman padi. Pendangkalan danau terjadi setiap tahunnya , hal ini yang mendorong warga setempat untuk lebih banyak memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan pertanian karena semakin subur dan potensial. (hasil wawancara 14 desember 2012). Pada umumnya pembentukan tanah *balete* di Desa Mannagae dan Desa Wele terbentuk akibat proses perbuatan manusia yang dilakukannya melalui pembukaan lahan hutan rawa. Pembentukan tanah tanah *balete* yang berada di pesisir Danau

Lapompakka dapat dikatakan atas dasar usaha manusia, kemudian ditunjang dukungan alam sehingga terbentuklah lahan tanah *balete*. Banjir yang terjadi setiap tahunnya mengakibatkan proses pengdangkalan 1-3 cm. Jadi selain akibat perbuatan manusia, tanah *balete* ini tidak lepas dari peranan alam. (Sumber: Data Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Wajo).

2. Lama Penguasaan Tanah *Balete*

Tanah *balete* yang dikuasai oleh warga Desa Mannagae dan Desa Wele yang menjadi objek penelitian, sampai saat ini belum memiliki data yang jelas mengenai luas secara keseluruhan. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikan Kabupaten Wajo, terdapat sekitar 50 unit alat tangkap *balete* yang tersebar di seluruh bagian pesisir Danau Lapompakka yang luas tanah *balete* per-unitnya minimal 1 hektar dan maksimalnya dapat mencapai 7- 10 hektar.

Desa Mannagae dan Desa Wele adalah desa yang berdekatan dengan pesisir Danau Lapompakka. Tanah *balete* yang terdapat pada kedua desa tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang menguasai dan memanfaatkan tanah *balete*. Tanah *balete* yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dapat mencapai 10 hektar perorangnya . Luas tanah *balete* sendiri yang dikuasai oleh responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel .4
Luas Tanah *Balete*

No	Luas Tanah <i>Balete</i>	Desa Mannagae	Desa Wele	Persentase (%)
1	<3 hektar	2	3	25%

2	3-6 hektar	7	6	65%
3	>6 hektar	1	1	10%
	Jumlah	10	10	100%

Sumber : data primer 2012

Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel 4 diatas, luas tanah yang dikuasai masyarakat kedua desa tersebut mayoritas berkisar rata-rata 3-6 hektar yakni sebanyak 13 Orang dari 20 responden atau 65 % dari sampel. Hal ini menggambarkan bahwa sewaktu masyarakat membuka lahan hutan rawa atau yang sekarang dikenal sebagai tanah *balete*, warga masih dalam masa usia produktif, itu terlihat dari kemampuan mereka membuka lahan sampai dengan 7 hektar luasnya.

Menurut H. Abbas (wawancara 12 Desember 2012) bahwa Pemanfaatan tanah *balete* oleh masyarakat setempat sudah dilakukan selama kurang lebih enam puluh tahun yang didasarkan pada pembagian lahan yang dilakukan *Arung Matoa* terhadap rakyatnya. Lama penguasaan tanah *balete* oleh warga setempat bervariasi dan telah berlangsung secara turun temurun. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel. 5
Lama Penguasaan

No	Lama Penguasaan	Desa Mannagae	Desa Wele	Persentase (%)
----	-----------------	---------------	-----------	----------------

1	<60 tahun	7	6	65%
2	>60 tahun	3	4	35%
3	Jumlah	10	10	100%

Sumber : Data primer 2012

Berdasarkan datayang telah diolah pada tabel 5 diatas, penguasaan tanah *balete* yang dilakukan oleh warga pada kedua desa secara umum sudah berlangsung sangat lama. Hal ini terlihat dari 20 responden, sebanyak 13 orang atau 65% telah menguasai tanah *balete* lebih dari 60 tahun. tersebut. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tanah *balete* sudah melekat dan menjadi harta kekayaan bagi warga yang sudah memanfaatkan, menguasai dan menggunakannya sebagai sumber mata pencaharian. Keadaan ini pula menunjukan bahwa penguasaan tanah *balete* pada kedua desa memiliki kesamaan rentang waktu penguasaan yaitu mayoritas penguasaannya lebih dari 60 tahun. Selain itu, gambaran penguasaan tanah *balete* tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara warga dan tanah dalam hal peguasaan tanah *balete*. Penguasaan dalam kurung waktu tersebut mengakibatkan timbulnya persepsi masyarakat setempat yang menganggap bahwa tanah *balete* secara otomatis dapat dimiliki dan dikuasai.

3. Bentuk pengaturan tanah *balete*

Tanah *balete* sudah menjadi salah satu jenis tanah daratan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan potensial untuk dijadikan sebagai lahan produktif dalam bidang pertanian walaupun sebenarnya masih memiliki potensi untuk

tergenang air. Akan tetapi secara geografis tanah *balete* sebenarnya memiliki letak yang berbeda-beda. Tanah ini terbentang dari bagian yang paling dalam sampai dengan bagian yang paling dangkal atau bagian yang berdekatan dengan lahan persawahan. lahan yang berdekatan langsung dengan persawahan ini biasanya kebanyakan dijadikan lahan pertanian ketimbang sebagai alat tangkap pasif(alat tangkap *balete*).

Akibat penguasaan tanah *balete* ini sudah berlangsung lama, maka perlu adanya pengaturan terhadap tanah tersebut supaya tidak menimbulkan kesimpangsiuran mengenai status kepemilikan yang bisa timbul antara individu maupun dengan pemerintah setempat. Berdasarkan pendapat 20 responden, menyatakan bahwa tanah *balete* yang dikuasai selama ini masih berdasarkan pada hukum kebiasaan masyarakat setempat dengan penguasaan secara langsung. Hukum kebiasaan adalah hukum lisan yang dianut oleh masyarakat setempat dan timbul disebabkan oleh kebiasaan. Hal ini tergambar dalam kebiasaan bahwa apabila seseorang membuka lahan maka secara otomatis menjadi hak milik dan hak penguasaanya karena lahan itu ada akibat kerja kerasnya. Penguasaan tanah *balete* dengan cara tersebut masih efisien meskipun aturan tersebut tidak tertuang dalam perundang-undangan. Tata cara penguasaan tanah *balete* di daerah setempat juga memiliki implikasi langsung yang meminimalisir peluang kepada pihak lain untuk melakukan penguasaan terhadap tanah *balete* yang dikuasai oleh warga setempat.

C. Status Penguasaan Tanah *Balete*

Tanah *balete* merupakan salah satu jenis tanah yang dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis tanah timbul dilihat dari posisi dan letaknya. Tanah *balete* adalah salah satu sumber daya alam yang sangat potensial karena memiliki peranan yang multifungsi yaitu selain sebagai lahan pertanian tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat tangkap ikan pasif (alat tangkap pasang-surut). Dengan adanya sumber daya alam yang berupa tanah *balete* di pesisir Danau Lapompakka dapat mejadi suatu nilai tambah yang bersifat ekonomis dan potensial untuk dimanfaatkan menjadi areal penangkapan ikan, lahan penanaman tanaman jagung, cabe, ataupun lahan persawahan melalui percetakan sawah-sawah baru. Pemanfaatan tanah *balete* tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan daerah danau khususnya yang memiliki potensi yang cukup besar terhadap kerusakan kelestarian danau dan kelangsungan ekosistem yang berada di danau. Namun dampak adanya tanah *balete* juga mempengaruhi penghasilan masyarakat setempat, sebab dengan adanya tanah *balete* lahan yang dapat dikelola menjadi bertambah bahkan sampai saat ini banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan pengelolaan dan pemanfaatan tanah *balete*.

Pemanfaatan tanah *balete* yang sudah berlangsung lama dan sudah dikuasai secara turun temurun mengakibatkan hampir keseluruhan tanah *balete* sudah berpindah tangan baik itu melalui pewarisan maupun jual-beli. Perpindahan tangan penguasaan tanah melalui pewarisan umumnya dilakukan secara langsung, yaitu ketika yang menguasai tidak mampu lagi mengelola maka akan diambil alih langsung oleh keturunannya sedangkan perpindahan penguasaan melalui jual beli

biasanya melalui bukti tertulis yang disaksikan oleh kepala desa ataupun saksi yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak. Perpindahan tangan tanah *balete* dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel. 6
Proses pemindahtanganan

No	Lokasi Tanah Balete	Desa Mannagae	Desa Wele	Persentase (%)
1	Jual-Beli	6	6	60%
2	Pewarisan	4	4	40%
3	Jumlah	10	10	100%

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan datayang telah diolah pada tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa proses pemindahtanganan tanah *balete* mayoritas didominasi melalui jual-beli. Hal ini terlihat, sebanyak 12 orang dari 20 responden atau 60 % berpindahtangan melalui jual-beli. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa selama ini penguasaan tanah *balete* yang sudah dikuasai secara turun-temurun dan dalam jangka waktu yang cukup lama mayoritas berpindahtangan melalui sistem jual-beli. Masyarakat merasa sudah mempunyai hak milik terhadap tanah Sehingga mereka sudah melakukan proses pemindahtanganan walaupun hal itu dilakukan mayoritas dengan keluarga maupun kerabatnya.

1. Menurut Hukum Adat Setempat

Berdasarkan hasil penelitian tanah *balete* yang berada di Desa Mannagae dan Desa Wele masih dikuasai oleh warga menurut hukum kebiasaan setempat. Menurut Abdul Azis (warga Desa Mannagae) bahwa sebenarnya tanah *balete* tidak dikuasai atas dasar keinginan masyarakat sendiri melainkan pihak pemerintahan yang memberikannya wewenang untuk membuka lahan sehingga dapat dikuasai dan dikelola demi kelangsungan hidupnya.

Pada masa pemerintahan *Arung Matoa* masyarakat diberikan wewenang untuk membuka lahan, pada saat itu ada dua pilihan yang ditawarkan yakni membuka lahan di bagian tanah daratan (tanah rinci) yang nantinya akan dijadikan lahan pertanian atau membuka lahan di daerah genangan air danau yang notabene-nya hutan rawa. Dengan dua pilihan ini mayoritas masyarakat di Desa Mannagae memilih untuk membuka lahan hutan rawa untuk dijadikan alat tangkap *balete*. Hal ini didasari karena pada saat itu tanah daratan tidak potensial untuk ditanami padi maupun tanaman palawija.

Menurut Lawellong bahwa tekstur tanah yang tandus dan belum adanya saluran irigasi membuat masyarakat lebih memilih menggarap hutan rawa yang sangat kaya akan sumber daya laut yang berupa ikan (wawancara 14 desember 2012). Secara umum, pendapat serupa juga diungkapkan oleh Lakile warga Desa Wele yang menyatakan bahwa tanah *balete* merupakan penopang utama ekonomi masyarakat pada saat. Ha ini disebabkan karena tanah persawahan belum produktif untuk ditanami palawija maupun padi.

Penguasaan tanah *balete* oleh warga setempat sampai saat ini masih bersifat penguasaan secara langsung. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah *balete*

dilakukan berdasarkan dengan adanya pengakuan hak milik secara lisan dari warga maupun pemerintah desa setempat, biasanya pengakuan secara lisan ini timbul akibat adanya saksi hidup yang menyaksikan orang yang menguasai tanah *balete* itu membuka langsung lahannya. Apabila sudah melalui lintas generasi dalam hal ini orang yang membuka lahan sudah meninggal dunia maka, pengakuan lisan biasa timbul karena faktor pewarisan ataupun melalui sistem jual-beli.

Fakta lain yang timbul dalam penguasaan tanah *balete* ini yaitu menurut Abdul Azis (tokoh masyarakat Desa Mannagae) bahwa warga desa setempat sering berselisih dengan warga Kelurahan Tangkoli, hal tersebut dikarenakan warga kelurahan tangkoli mengklaim sebagian tanah yang berada dalam penguasaan warga Desa Mannagae sebagai daerah teritorialnya sehingga merasa mempunyai hak penguasaan. Akan tetapi warga Desa Mannagae bersikukuh bahwa penguasaan tanah tersebut secara penuh berada pada masyarakat Desa Mannaga. Warga Desa Mannagae yang membuka lahan menganggap bahwa warga Kelurahan Tangkoli semena-mena mengambil dan menguasai tanah *balete* yang sebelumnya dikuasainya. Apabila mengacu pada keputusan *Arung Matoa* daerah Kelurahan Tangkoli tidak memiliki daerah teritorial berupa tanah *balete* tapi hanya tanah daratan saja. Akan tetapi karena disebabkan oleh faktor alam sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran pada batas antara kedua daerah ini. Hal itu dikarenakan daerah pesisir danau mengalami pengdangkalan sehingga batas yang awalnya air dan daratan, berubah menjadi daratan berbatasan dengan daratan. Kelurahan Tangkoli mengklaim daratan yang masuk teritorial Desa

Mannagae sebagai daerahnya padahal secara geografis merupakan daerah Desa Mannagae. Perselisihan ini sudah berlangsung lama dan sudah dilakukan musyawarah beberapa kali tetapi belum mendapatkan titik temu tentang masalah batas antara kedua desa ini (hasil wawancara tanggal 14 Desember 2012). Dalam menyelesaikan perselisihan tersebut pihak pemerintah sudah turun tangan untuk menyelesaikan mengenai daerah perbatasan ini. Akan tetapi menurut Abdul Aziz bahwa pihak pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tersebut tidak netral atau lebih dominan mendukung pihak Kelurahan Tangkoli. Hal inilah yang mendasari sampai saat ini masyarakat Desa Mannagae tidak pernah menerima usulan dan saran dari pemerintah setempat. (wawancara tanggal 14 Desember 2012)

Status penguasaan tanah *balete* oleh warga setempat pada awalnya disertai dengan retribusi pemakaian alat tangkap *balete*. Menurut Andi Herman (sekretaris Desa Mannagae) bahwa kegiatan yang dilakukan warga yang menguasai tanah masih bersifat penguasaan bukan bersifat kepemilikan, sebab tanah tersebut merupakan tanah yang berada dalam daerah genangan air, jadi jangan sampai disetujui untuk pendaftaran tanah malah menimbulkan utang pajak. Dengan dasar daerah yang sering tergenang air, bagaimana bisa ditanami, dan apabila tidak ditanami bagaimana cara membayar pajaknya. Alasan lainnya juga yaitu sebagian besar masyarakat yang menguasai tanah *balete* tidak pernah melaporkan tanah yang dikuasai kepada pemerintah untuk mendapat izin pengelolaan maupun didaftarkan.

Menurut Syarifuddin (Warga Desa Mannagae) bahwa sebagian sudah pernah melaporkan tanah *balete* yang dikuasai untuk didaftarkan tetapi pihak pemerintah

tidak merespon positif, mereka menganggap tanah tersebut tidak bisa diberikan hak milik karena merupakan tanah negara. (hasil wawancara 15 Desember 2012). Menurut Abdul Azis (mantan Kepala Desa Mannagae 2 periode) bahwa pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah dilakukan secara turun-temurun menurut hukum kebiasaan. Pengaturan terhadap tanah *balete* di Desa Mannagae masih mengacu pada hukum kebiasaan yaitu dengan menetapkan pemilik tanah berdasarkan dengan riwayatnya tanah. Faktor budaya setempat pada awalnya turut mempengaruhi ketaatan warga terhadap hukum kebiasaan tersebut, sebab warga setempat masih menjunjung tinggi budaya *siri*” berkaitan dengan penguasaan sesuatu yang bukan haknya sehingga hukum kebiasaan melindungi warga masyarakat yang menguasai tanah tersebut (hasil wawancara 14 Desember 2012). Berdasarkan pendapat tersebut aparat pemerintah yang berada di desa mengakui hukum kebiasaan masyarakat setempat dalam memanfaatkan tanah *balete*. Hal ini memiliki dampak terhadap pengelolaan tanah *balete* oleh masyarakat tanpa didasarkan dengan surat izin pengelolaan yang merupakan dasar kewenangan bagi si pemegangnya untuk melakukan aktivitas untuk mengelola tanah *balete* unsur-unsur yang berstandarkan substansial, tanpa adanya surat izin dalam pengelolaan tanah *balete* maka tidak ada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola tanah *balete* tersebut.

2. Menurut UUPA

Sebenarnya hal yang paling penting belum dilakukan oleh pemerintah yaitu mengenai pendataan tanah *balete* yang ada di daerah tersebut. Hal itu dikarenakan tanah *balete* ini terkesan masih dalam ruang lingkup dinas perikanan dan kelautan

kabupaten wajo. Tanah *balete* sendiri mayoritas masih berbentuk alat tangkap ikan pasif/alat tangkap *balete* sehingga masih difungsikan untuk menangkap ikan. Tanah *balete* adalah satu rangkaian dari alat tangkap *balete* sendiri sehingga tanah tersebut secara tidak langsung masih bagian dari alat tangkap *balete*. Penguasaan tanah *balete* yang berada dalam kawasan tertentu tidak akan mendapatkan hak penguasaan ataupun kepemilikan dari BPN Kabupaten Wajo.

Menurut Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wajo bahwa tanah *balete* yang dikuasai oleh warga saat ini bersifat pemanfaatan dan tidak memiliki alas hak yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat karena masih satu rangkaian dengan alat tangkap *balete*. Penguasaan tanah *balete* yang berada dalam kawasan tertentu tidak akan mendapatkan hak kepemilikan dari BPN Kabupaten Wajo. Ketentuan mengenai kawasan tersebut dituangkan dalam pasal 30 Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Wajo Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang menetapkan bahwa pengelolaan *balete* (mencakup alat tangkap *balete* dan tanah *balete*) hanya berlangsung selama satu tahun dan tidak boleh dipindahtangankan, digadaikan ataupun dikuasai secara turun temurun. Aturan ini diberlakukan secara merata di sepanjang daerah daerah pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo. Hal inilah yang menjadi pedoman bagi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wajo untuk menata dan mengawasi tanah *balete* di sepanjang pesisir Danau Lapompakka. tetapi diluar adanya peraturan daerah yang mengatur, ada fakta yang tidak bisa dikesampingkan bahwa penguasaan tanah *balete* ini sendiri sudah dilakukan oleh masyarakat jauh sebelum di berlakukannya peraturan daerah mengenai *balete* ini (alat tangkap

beserta tanah *balete*) bahkan sebelum diberlakukannya UUPA. Oleh karena itu mengacu pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai penguasaan secara turun-temurun serta memperhatikan pasal 14 mengenai garis sempadan danau paparan banjir yang berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, maka BPN dapat menjadikannya pedoman untuk memproses permohonan hak penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah *balete* yang berada di sepanjang pesisir danau lapompakka. Tanah *balete* yang jaraknya lebih dari 50 meter dari garis sempadan danau dapat dimohonkan hak penguasaan dan kepemilikan kepada BPN sesuai dengan ketentuan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. permohonan hak atas tanah *balete*/ tanah timbul dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan secara tertulis kepada BPN setempat
2. Melampirkan dokumen berupa gambar beserta surat ukur yang merupakan hasil pengukuran oleh panitia yang telah ditunjuk oleh BPN
3. Membayar biaya permohonan
4. Menerima surat keputusan pemberian hak milik atas tanah negara.

Tanah *balete* yang dapat dimohonkan hak dalam hal ini ditentukan pada tanah *balete* yang berada di luar area kawasan tertentu dalam radius 50 meter. Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai penguasaan tanah *balete* yaitu tanah *balete* yang memiliki rinci. Rinci adalah dokumen kepemilikan sebelum berlakunya UUPA yang merupakan bukti kepemilikan, dalam hal ini BPN dapat melakukan

konversi dengan mengeluarkan sertifikat hak milik. Selain itu, BPN juga menghimbau seluruh aparat pemerintah yang di daerahnya terdapat tanah *balete* untuk tidak mengeluarkan surat izin berupa alas hak baru bagi warga yang mengusahakan tanah *balete* dalam kawasan tertentu serta memberikan teguran kepada warga yang mengusahakan tanah *balete* apabila telah mengakibatkan kerugian bagi warga lain akibat pemanfaatan tanah *balete* tersebut. Tanah *balete*/tanah timbul merupakan tanah yang tidak dapat diperjualbelikan sebab tanah tersebut masih berstatus tanah negara. Faktor lain yang menjadi pertimbangan BPN Kabupaten Wajo yaitu kondisi tanah. Menurut Bustam (kepala BPN Kabupaten Wajo) Dalam pemberian hak kepada pemohon, selain memperhatikan data yuridis dan data fisik BPN juga memiliki dasar pertimbangan tersendiri untuk mengeluarkan hak kepemilikan yang telah dimohonkan, pertimbangan tersebut dianggap penting karena berkaitan dengan keselamatan jiwa dan harta benda warga apabila terjadi bencana alam. (hasil wawancara 20 desember 2012). Akan tetapi sampai sekarang belum ada sebidang tanah *balete* pun yang bersertifikat hal itu dikarenakan minimnya masyarakat melaporkan tanah yang dikuasainya dan pihak Pemerintah pun hanya mengatur tanah *balete* tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perikanan serta belum adanya tindakan nyata dari pihak BPN setempat itu sendiri.

Berdasarkan data diatas, penguasaan tanah *balete* yang berada 50 meter dari garis sempadan danau tidak dapat dimohonkan penguasaan maupun kepemilikan atas tanah. Selanjutnya, apabila tanah *balete* mengalami pengdangkalan melebihi 50 meter maka tanah selebihnya dapat dimohonkan hak penguasaan maupun hak

kepemilikan. Ketentuan ini juga dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Tanah *balete* yang masih berstatus tanah negara tidak dapat dituntut ganti rugi oleh warga apabila di atas tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan sarana kepentingan umum oleh pemerintah. Sementara itu warga yang telah menggarap tanah *balete* sampai saat ini merasa sudah cukup menguasai tanah *balete* tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak lain meskipun tanpa adanya bukti tertulis baik berupa surat izin menggarap dari pemerintah setempat maupun sertifikat. Pemberlakuan ketentuan mengenai pembatasan penguasaan tanah *balete* yang berada dikawasan pesisir Danau Lapompakka merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Wilayah Perikanan. Persepsi masyarakat setempat mengenai status penguasaan tanah *balete* yang *notabene*-nya salah satu jenis tanah timbul dapat menjadi hambatan bagi pemerintah apabila akan mengambil alih tanah *balete* yang telah dikuasai warga setempat selama puluhan tahun. Hal ini dapat terjadi karena warga yang menguasai tanah tersebut merasa sudah memilikinya dan ketika ada pihak yang akan mengambil alih, maka secara otomatis warga akan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sesuatu yang dimilikinya. Status tanah *balete* yang baru maupun yang sudah lama dikuasai warga tidak memiliki perbedaan mengenai penguasaannya. Sampai saat ini instansi pemerintah setempat juga belum menerima permohonan status hak penguasaan oleh warga yang telah menguasai tanah *balete*, keengganan warga

disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah setempat. Berdasarkan pasal 22 UUPA disebutkan bahwa terjadinya hak milik disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- a. Menurut hukum adat yang akan diatur dengan peraturan pemerintah yang mengatur terjadinya hak milik menurut hukum adat samapai sekarang belum diterbitkan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut belum memiliki kriteria yang jelas mengenai kepemilikan tanah yang terjadi karena hukum adat, sehingga ketentuan ini juga belum dapat diterapkan terhadap kepemilikan atas tanah *balete*. Hukum adat itu sendiri dapat diakui eksistensinya apabila dalam lingkungan masyarakat tersebut masih terdapat komponen masyarakat adat yang meliputi:

1. Kepala adat
2. Lembaga adat
3. Pelaksana hukum adat

Penguasaan tanah *balete* yang terjadi di pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo sampai saat ini didasarkan pada kearifan lokal sebab di daerah setempat tidak dapat dijumpai lagi komponen yang menunjukkan eksistensi dari hukum adat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penguasaan tanah *balete* di pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo tidak dapat dijadikan hak milik yang terjadi menurut hukum adat.

- b. Menurut ketentuan undang-undang

Dalam ketentuan ini diatur mengenai pengakuan hak-hak atas tanah lama sebelum berlakunya UUPA, namun hak-hak atas tanah tersebut harus diubah atau konversi menjadi hak-hak atas tanah dalam UUPA. Jika

dikaitkan dengan penguasaan tanah *balete* yang terjadi di pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo maka hal ini memungkinkan terjadinya hak milik atas tanah *balete* oleh warga selama warga yang menguasai tanah *balete* memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah *balete* yang berasal dari hak-hak atas tanah lama (dokumen berupa rinci) sebelum berlakunya UUPA. Berdasarkan hasil penelitian, warga setempat tidak pernah melakukan pendaftaran hak milik atas tanah *balete* baik sebelum berlakunya UUPA maupun setelah berlakunya UUPA. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam pasal 588-599 *Burgerlijk Wetboek* menetapkan bahwa tanah timbul (tanah *balete*) yang melekat pada kebendaan atau sebuah tubuh dengan kebendaan itu, maka menjadi milik dari pemilik tanah yang dilekati, sehingga warga setempat masih berpegang pada pengaturan tersebut yang diterapkan secara turun temurun dan telah menjadi suatu kearifan lokal bagi warga setempat.

c. Penetapan Pemerintah

Pemberian hak tanah yang terjadi menurut penetapan pemerintah memberikan hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, serta pemberian hak pengelolaan. Tanah negara yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang berarti bahwa tidak ada pihak lain di atas tanah tersebut. status tanah *balete* dalam posisinya sebagai tanah timbul, tidak ada hak pihak lain di atas tanah tersebut. status tanah *balete* yang merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara termasuk tanah

yang penguasaannya dapat diperoleh menurut penetapan pemerintah. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo menetapkan bahwa tanah *balete* yang berada di sepanjang pesisir Danau Lapompakka tidak dapat dimohonkan hak apabila tanah *balete* tersebut masih berada dalam jarak 50 meter dari garis sempadan danau. kebijakan tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 14 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tentang Sungai serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2029. Penguasaan tanah *balete* yang berada di pesisir Danau Lapompakka saat ini belum juga mendapatkan hak dari pemerintah setempat. jadi, status tanah *balete* yang berada di daerah tersebut masih berstatus tanah yang langsung dikuasai oleh negara sehingga warga dalam hal ini tidak memiliki kewenangan terhadap tanah tersebut.

Badan Pertanahan sampai saat ini belum melakukan inventarisasi tanah *balete* sebagaimana yang ditetapkan dalam surat Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul Dan Reklamasi. Hal ini didasari bahwa tanah *balete* sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Tingkat II Kabupaten Wajo Tentang Pengelolaan Wilayah Perikanan. Sementara itu masyarakat yang menguasai tanah *balete* juga enggan melaporkan tanah *balete* yang dikuasainya kepada pemerintah setempat sehingga dapat dikatakan bahwa tanah *balete* yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai aset terselebung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya koordinasi antara pemerintah setempat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan peraturan mengenai tanah *balete*, karena pemerintah yang berada di tingkat desa belum memahami dengan jelas peraturan tentang tanah *balete* sehingga terjadilah pembiaran pengelolaan tanah *balete* tanpa disertai dengan izin pengelolaan dari pemerintah setempat. Beberapa tindakan pemerintah tersebut dapat menimbulkan terjadinya pengalihan hak terhadap tanah negara secara diam-diam oleh beberapa pihak yang dapat merugikan pihak lain (pihak pembeli). Oleh Karena itu, pemanfaatan tanah *balete* harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah setempat agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah *balete*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, keberadaan tanah *balete* di Desa Mannagae Kecamatan Tanasitolo dan Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan warga dalam berbagai sektor. Perikanan dan pertanian merupakan sektor utama dalam pemanfaatan tanah *balete* mengingat mata pencaharian warga setempat mayoritas di bidang pertanian dan ada juga yang rangkap menjadi nelayan untuk mengurus *balete* ketika datang musim penghujan. Selain itu, tingkat kesuburan tanah *balete* yang tinggi dan kaya akan sumber daya ikan menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi warga untuk melakukan penangkapan ikan ataupun bercocok tanam.

Status penguasaan tanah *balete* yang berada di daerah tersebut masih didasarkan pada hukum kebiasaan masyarakat setempat yaitu dengan menetapkan

pemilik tanah *balete* adalah orang yang membuka hutan rawa dan membuatnya sebagai alat tangkap *balete*. Surat izin tentang pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk retribusi pernah diberikan pemerintah tapi hanya sebatas dalam pemakaian alat tangkap pasif ikan sedangkan mengenai izin pengelolaan tanah *balete* belum pernah diberikan izin pengelolaan.

Pengaturan mengenai tanah *balete* masih bersifat kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Tanah *balete* yang dikelola secara turun-temurun tidak dapat dialihkan tanpa adanya persetujuan orang yang menguasai dan membuka lahan tanah *balete* ini pada awalnya sehingga penguasaan tanah *balete* selama ini bersifat individual. Persepsi masyarakat terhadap penguasaan tanah *balete* yang menganggap tanah tersebut merupakan tanah tak bertuan yang mereka buka menjadi faktor pendorong untuk terus menerus menguasai tanah tersebut. pengaturan seperti ini sudah berlangsung turun-temurun dan efektif sehingga pemerintah setempat tidak perlu mengeluarkan peraturan mengenai tanah *balete*. Pemerintah setempat mengakui bahwa pengaturan tanah *balete* yang dilakukan masyarakat selama ini belum pernah menimbulkan konflik mengenai penguasaan tanah *balete* baik antara warga sendiri maupun warga dengan pemerintah.

Pemanfaatan tanah *balete* oleh masyarakat setempat tanpa dilengkapi oleh izin garap dari pemerintah. Hal ini merupakan sikap toleransi dari pemerintah setempat terhadap masyarakat yang memanfaatkan tanah *balete* karena pemerintah menganggap bahwa pemanfaatan tanah *balete* oleh masyarakat setempat masih berstatus pengelolaan tanah negara. Pengelolaan tanah *balete*

tanpa adanya izin dari pemerintah setempat dapat dikatakan pengelolaan bersifat liar karena tanpa mendapatkan alas hak untuk mengelola tanah negara. Selain itu, tindakan pemerintah tersebut juga tidak mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga yang mengusahakan tanah *balete*.

Kebutuhan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam penguasaan tanah *balete* bertujuan untuk memberikan keamanan bagi masyarakat dari gangguan pihak lain apabila memerlukan tanah tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, pemberian hak atas tanah *balete* perlu juga mempertimbangkan aspek yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi tata ruang wilayah setempat. Tanah *balete* yang berada di sepanjang pesisir Danau Lapompakka memiliki potensi untuk terus bertambah apabila tanah tersebut terus dikelola oleh masyarakat setempat. Oleh Karena itu, peran aktif pemerintah setempat diharapkan dapat menata dan mengawasi mengenai penguasaan tanah *balete* tersebut.

Penulis sepakat dengan adanya ketentuan dalam pasal 14 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Efektifitas peraturan tersebut tidak terlepas dari peran aktif pemerintah setempat dalam mengeluarkan izin pemanfaatan tanah negara. Peranan pemerintah terkait izin pemanfaatan adalah menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan warga yang membuka langsung lahan tanah *balete* tersebut untuk mendapatkan izin pengelolaan. Selain itu, pernah ditumbuhkan ketaatan hukum masyarakat untuk melaksanakan penegasan status tanah *balete* yang telah dikuasai agar dapat memperoleh hak atas tanah secara tertulis dari pemerintah.

Penguasaan tanah *balete* yang masih menganut sistem kearifan lokal bukan hanya dapat ditinjau dari aspek budaya namun hal ini perlu mendapatkan perhatian dari aspek yuridis. Tinjauan dari aspek yuridis diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul berkaitan dengan penguasaan tanah *balete*. Meskipun pengaturan tanah menurut hukum adat telah diakui dalam UUPA namun ketentuan tersebut tidak sepenuhnya mengakomodir nilai-nilai hukum adat, sebab nilai-nilai tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penguasaan tanah *balete* maka, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tanah *balete* yang terdapat disepanjang pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo secara umum diatur menurut hukum kebiasaan masyarakat yang bersifat kearifan lokal. Berdasarkan pengaturan tersebut warga yang dapat menguasai tanah *balete* yaitu warga yang langsung membuka lahan hutan rawa di daerah pesisir danau. Adanya penguasaan fisik oleh warga menjadi faktor pendorong untuk melakukan pengelolaan. Pengelolaan tanah *balete* dilakukan dengan cara terlibat langsung untuk mengelola tanah tersebut.
2. Penguasaan tanah *balete* tidak diatur dengan jelas dalam bentuk perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Tetapi karena letak dan proses terjadinya berlatar belakang seperti tanah timbul maka, tanah *balete* ini dikategorikan sebagai salah satu jenis tanah timbul oleh pemerintah setempat . Tanah timbul ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah yang menetapkan bahwa tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Selanjutnya, hal-hal mengenai penguasaan dan pemilikan tanah timbul diatur dalam surat edaran Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293. Namun, ketentuan tersebut belum

sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo . Hal ini terlihat belum adanya pendataan mengenai tanah *balete* yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Kurangnya koordinasi antara pemerintah setempat yang meliputi Kepala Desa, Camat, BPN juga menjadi faktor dalam penegasan status penguasaan tanah *balete*.

B. Saran

1. Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai status tanah *balete* sebagai tanah yang dikuasai oleh negara melalui program sosialisasi
2. Sebaiknya pemerintah setempat segera mengambil langkah untuk menginventaris tanah *balete* yang ada di pesisir Danau Lapompakka. Hal ini bertujuan untuk mengamankan tanah negara agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah tersebut serta untuk menghindari terjadinya pengalihan hak terhadap tanah negara tanpa persetujuan dari pemerintah setempat.
3. Masyarakat setempat diharapkan pro-aktif dalam upaya inventaris tanah *balete* dengan memberikan informasi yang jelas kepada pihak pemerintah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mengajukan permohonan izin pengelolaan ataupun kepemilikan tanah *balete* sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam memanfaatkan tanah *balete*.

4. Sebaiknya pemerintah dapat memfasilitasi dalam pemberian hak milik atas tanah *balete* yang sudah memenuhi kriteria pengajuan untuk diberikan status hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad Chomzah.2002. *Hukum Pertanahan*.Prestasi Pustaka. Jakarta,
-----, 2003. *Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Barhaman. 2007. *Hak Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Tesis.Universitas Hasanuddin. Makassar.
- BoediHarsono. 2004. *HukumAgraria Indonesia*. Djambatan. Jakarta
-----2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Chairur Arrasyid. 2001. *Dasar-Dasar Dalam Hukum*. SinarGrafika. Jakarta
- G. Kartasapoetra,.1992. *Masalah Pertanahan Indonesia*.PT BinekaCipta. Jakarta.
- Johannes Widodo, Suadi. 2008. *Pengelolaan Sumber daya Perikanan Laut*. Gadjah Mada University.Yogyakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. *Hak-hakAtas Tanah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mariot P. Siahaan. 2005. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, Rajawali Press. Jakarta.
- Mohammad Hatta. 2005. *Hukum Tanah NasionalDalamPerspektifNegara Kesatuan*. Media Abadi.Yogyakarta.
- M. Yusuf DM. 2002. *Kemiskinan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jenenponto*.Tesis.UniversitasHasanuddin. Makassar.
- Rahardjo. 2000. *IlmuHukum*. Citra AdityaBakti. Bandung.
- R Subekti, dan R Tjitrosudibio, 1987. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Jakarta: PradayaPramita.

Soedharyo Soimin. 2004. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. SinarGrafika. Jakarta.

Sri Susyanti Nur. 2010. *Hak Guna Laut Dalam Usaha Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan* (suatu Kajian Agraria Kelautan). Pustaka Pena Press. Makassar.

Y.W Sunindhia, Ninik Widiyanti. 1988. *Pembaharuan Hukum Agraria*. Bina Aksara.Jakarta.

Internet:

Artikel yang berjudul "Lurah Tangkoli Nilai Tak Ada Perampasan Hak Sengketa Perbatasan Maniangpajo-Tanasitolo di akses di beta.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid.tanggal 28 September 2012 pukul 11.15 WITA.

Artikel yang berjudul "Nelayan" di akses diId.wikipedia.org/wiki/Nelayan.tanggal 01 Oktober 2012 pukul 13.01 WITA.

Artikel yang berjudul "Hak –hak atas tanah menurut UPA dan PP. No. 40/1996" diakses di hasyimsoska.blogspot.com/.../hak-hak-atas-tanah-menurut-uupa-dan-pp/40/1996. tanggal 2 oktober 2012 pukul 14.30 WITA.

Artikel yang berjudul "Hapusnya Hak Atas Tanah" di akses dilanddiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atas-tanah.html.tanggal 2 Oktober 2012 pukul 14.23 WITA.

Artikel yang berjudul "Pengertian Danau" diakses di www.pengertiandefinisi.com › [Danau](http://www.pengertiandefinisi.com/Danau). tanggal 22 oktober 2012 Pukul 21.45 WITA.

Artikel yang berjudul "Defenisi/Pengertian Danau, macam/jenis & fungsi danau di Indonesia-Belajar Geografi" diakses di organisasi.org › [Ilmu Pengetahuan Alam](http://organisasi.org/Ilmu-Pengetahuan-Alam) › [Geografi](http://organisasi.org/Geografi). Tanggal 22 Oktober 2012 Pukul 22.10 WITA.

Artikel yang berjudul "Pengertian Danau" diaksesdi <http://id.shvoong.com/exact-sciences/astronomy/2243381-pengertian-danau/#ixzz2A1d5svMm>. Tanggal 22 Oktober 2012 Pukul 22.15 WITA.

Artikel yang berjudul "Berbagai Jenis Danau Di Dunia" diakses di arisudev.wordpress.com/.../berbagai-jenis-danau.tanggal 22 Oktober pukul 22.40 WITA.

Peraturanperundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan sarana kepentingan umum.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976, tanggal 13 Januari 1976 Tentang Pedoman Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan, Dengan Bidang Tugas Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum, mengenai pelaksanaan pemberian hak pengusaha hutan dan hak pemungutan hasil hutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberilan Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang perikanan.

LAMPIRAN

- Pematang tanah *balete*



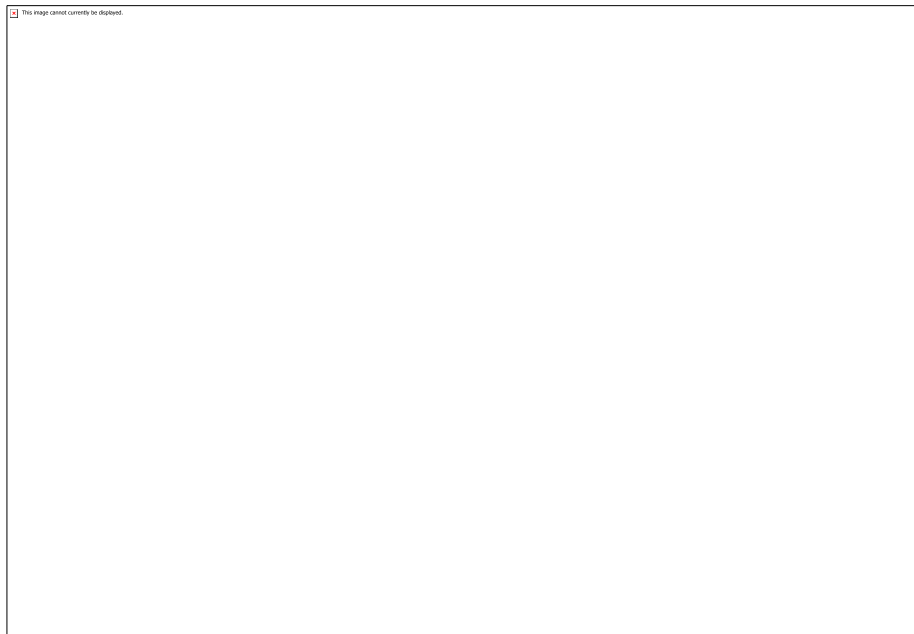
- Alat tangkap *balete* (*Bari*)



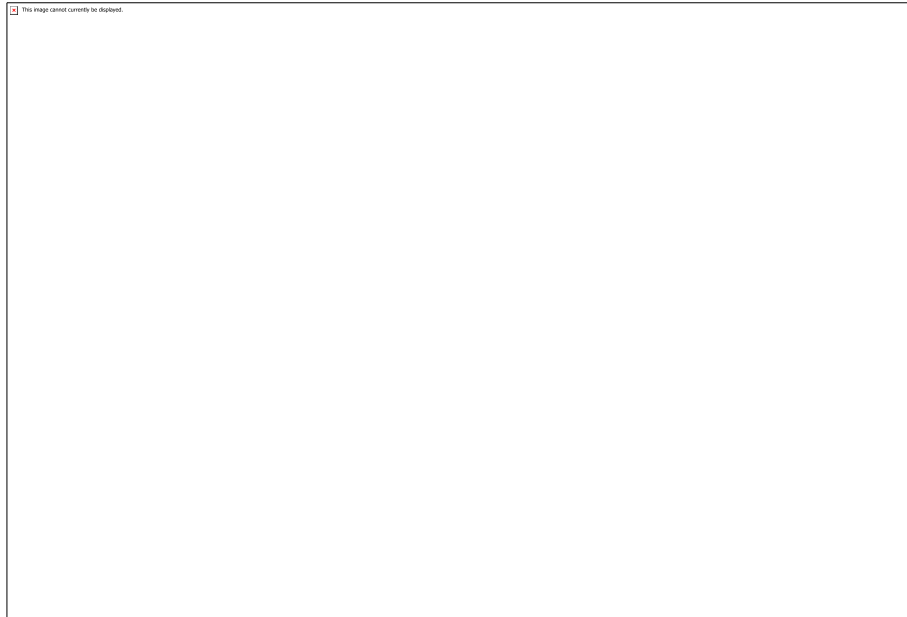
- Jalur pembuangan air alat tangkap *balete*



- Hamparan Tanah *balete* yg berbentuk rawa



- Salima (alat pembatas di jalur air *balete*)



- Hampan Tanah *balete* yang berbentuk cetakan sawah

